

346.05  
PUR  
P c1

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN  
DI DESA PAHOKNG KECAMATAN MAMPAWAH HULU  
KABUPATEN LANDAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

**TESIS S2**

**Program Study**

**Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro**



**Oleh :**

**PURNAWAN, SH**

**NIM. B4B001176**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN  
DI DESA PAHOKNG KECAMATAN MAMPAWAH HULU  
KABUPATEN LANDAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

**Disusun Oleh :**

**PURNAWAN, SH  
NIM. B4B001176**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 05 Desember 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

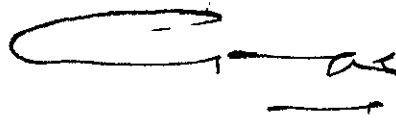
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Hj. Sri Sudaryatmi, SH., M.Hum.

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2401/T/MNF/C1
Tgl.	08/03/04

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, .....

(PURNAWAN, SH)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAHOKNG KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK PROPINSI KALIMANTAN-BARAT”

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen penguji tesis penulis.
2. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen penguji tesis penulis.
3. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, MH, sebagai Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Tim review proposal tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
5. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Para Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan pada Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Kurnia Wardani (Nia), yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam buat Papa dan Mama yang tercinta, serta kakak-kakak dan adikku tersayang, karena atas doa dan dorongan semangat dari mereka, maka penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan maaf dan segala kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca semuanya.

Semarang, September 2003

Penulis

(PURNAWAN, SH)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK .....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Keluarga .....	10
B. Hukum Waris Adat.....	14
B. 1 Pengertian Hukum Waris.....	14
B. 2 Sistem Kewarisan Adat .....	19
B. 3 Harta Warisan .....	31
B. 4 Ahli Waris .....	47
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan .....	55
B. Spesifikasi Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian .....	56
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Penentuan Populasi dan Sampel .....	58
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	60
G. Analisa Data .....	64

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
A.1. Letak Desa Pahokng.....	65
A.2. Batas Wilayah Desa Pahokng .....	65
A.3. Penduduk .....	65
B. Perubahan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng .....	66
B.1. Cara-cara dan Proses Pewarisan .....	66
B.2. Harta Warisan .....	72
B.3. Ahli Waris .....	78
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Dalam Ketentuan Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.....	87
D. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng .....	91
BAB V PENUTUP .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng .....	67
2. Cara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng .....	70
3. Bentuk Harta Warisan Yang Terdapat Didalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.....	74
4. Ketentuan Hukum Adat Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.....	77
5. Ahli Waris Yang Telah Kawin Kemudian Menetap dan Bertempat Tinggal di Luar Harta Warisan Itu Berada .....	79
6. Faktor - faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Dalam Ketentuan Hukum Adat Waris di Desa Pahokng.....	87
7. Sengketa Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.....	91
8. Cara Penyelesaian Yang Ditempuh Oleh Ahli Waris Jika Terjadi Sengketa warisan .....	97



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA  
MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAHOKNG  
KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK PROPINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, serta sistem pewarisannya yang menyimpang/berbeda dari sistem pewarisan masyarakat Adat Dayak Kanayatn pada umumnya, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat Adat Dayak Kanayatn adalah sistem pewarisan individual dan kolektif. Sedangkan cara pembagian harta warisan dalam masyarakat Adat Dayak Kanayatn dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Di dalam masyarakat Adat Dayak Kanayatn, pemberian orang tua kepada anaknya memungkinkan anak lebih banyak diberikan kepada anak pangkalatn, yaitu anak yang menjamin, memelihara, dan mengurus orang tuanya sampai si pewaris meninggal. Tidak membedakan apakah ia adalah anak sulung, anak tengah, maupun anak bungsu, asalkan ia disebut sebagai anak pangualatan maka akan memperoleh bagian warisan yang lebih besar.

Apabila terjadi sengketa warisan, maka cara penyelesaian pertama kali yang ditempuh adalah secara kekeluargaan. Apabila belum dapat diselesaikan, maka upaya selanjutnya adalah dengan menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah adat. Namun jika masih belum ada penyelesaian sengketa warisan, maka sengketa warisan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri inilah yang merupakan penyelesaian tahap akhir dalam sengketa warisan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan antar para ahli waris dan oleh fungsionaris adat desa.

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis dimana menggambarkan, memaparkan, dan mengungkapkan sistem hukum adat setempat. Penulisan ini didasarkan atas hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat suku Dayak Kanayatn di desa Pahokng. Lokasi penelitian umumnya masih di dalam Kotamadya Pontianak, tetapi khususnya pada Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum waris adat dalam masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng telah mengalami perubahan, dimana ketentuan yang mengatur ahli waris yang telah kawin kemudian tidak tinggal dan menetap dilingkungan harta warisan orang tuanya, tidak mutlak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal ini disebabkan karena orang tua beranggapan bahwa ahli waris yang telah kawin dan menetap diluar harta warisan itu berada, sudah mampu membiayai hidupnya sendiri.

**THE REALIZATION OF INHERITANCE DISTRIBUTION  
ON DAYAK KANAYATN TRIBE  
IN PAHOKNG VILLAGE SUBDISTRICT MEMPAWAH HULU  
REGENCY OF LANDAK WEST BORNEO PROVINCE**

**ABSTRACT**

The aim of this research is for knowing the system of kinship and marital in Dayak Kanayatn tribe in Pahokng Village, and the system of inheritance which is deviated / different from the system of inheritance of Dayak Kanayatn tribe generally, and the factors that cause the changes.

The inheritance system that followed by Dayak Kanayatn tribe is the individual inheritance system and collective. Mean while the distribution of Inheritance in Dayak Kanayatn tribe done in family atmosphere and deliberation.

In Dayak Kanayatn tribe, the probability of the distribution from their parents to their children is more given to the "Pangkalatn son", who is guarantee, carry and take care of his parents until the heirs is die. No matter if he is the oldest, middle or the youngest, as long as he could call as a "Pangkalatn son", he will get much inheritance.

If there is a problem about the inheritance, first way to solve it is through deliberation. If it is unsolved, so the next step is taking the problem to the tribe court. But if it is still can't be solved, so the problem will be taken to the state court. It is the final way out of the problem that can be solved through deliberation between the heirs and by the village fungtionaries.

The methodology of this study used the research method of juridical-empiric and had descriptive analytical nature, which describe, explained, and revealed the local prescriptive law system. This study was based on the result of the interviews with public figures of Dayak Kanayatn tribe in Pahokng village. The site for the study was Pontianak municipality in general, Pahokng village subdistrict Mempawah Hulu regency of Landak in particular.

The result of this research showed that the determination of the right in inheritance of Dayak Kanayatn tribe in Pahokng village has been changed, which is the determination that arranges the heirs whom married and not stay and settle on their parent's inheritance neighbourhood. It is not absolute anymore to get the inheritance from their parents. It because the parents considered that the heirs whom married and stayed on the outside of that inheritance, are afford to support their financial.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang terbentang luas dan memiliki beribu-ribu pulau yang didiami oleh berbagai macam suku bangsa. Dari beraneka macam suku bangsa tersebut, maka akan ditemukan beraneka ragam bahasa, adat-istiadat, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Bilamana orang melihat suku bangsa Indonesia dimanapun juga, maka akan dijumpai lapisan masyarakat bagian bawah yang sangat luas, yang terdiri dari gerombolan yang bertalian satu sama lainnya. Hubungan tersebut, baik terhadap alam yang nyata maupun terhadap alam yang tidak nyata, serta untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya, mereka akan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mereka akan disebut masyarakat hukum.

Seperti halnya dalam bidang hukum di Indonesia, dimana sejak zaman dahulu sudah hidup dan berkembang hukum asli yang berlaku bagi masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum adat di daerah yang satu tidaklah sama dengan hukum adat di daerah lainnya. Hal itu disebabkan karena disetiap daerah atau suku bangsa yang satu dengan daerah atau suku bangsa yang lain kadang-kadang berbeda sama sekali. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya norma hukum yang berbeda pula.

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

Mengenai masalah pewarisan di Indonesia untuk saat ini masih belum diatur secara jelas oleh Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah pewarisan sampai saat ini masih berlaku hukum adat yang berlaku bagi golongan Indonesia, Hukum Islam dan hukum perdata barat yang berlaku bagi golongan eropa.

Hukum waris adat berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immateriil dari satu angkatan ke angkatan lainnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh sebab itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat di dalam masyarakat memiliki suatu kekhususan dalam hukum waris, dimana antara hukum waris yang satu berbeda dengan yang lainnya.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Eman Suparman, dimana beliau berpendapat bahwa sistem kekeluargaan waris adat adalah sebagai berikut :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol,

contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk dengan cara 'kawin jujur' yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya tersebut sudah banyak berubah.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dan sistem keturunan di atas, maka jelas bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985, Halaman 49.

dengan hal tersebut, sebagian besar masyarakat yang mendiami wilayah propinsi Kalimantan-Barat adalah suku Dayak. Suku Dayak juga terbagi dalam beberapa kelompok kecil, dimana masing-masing kelompok tersebut mempunyai struktur dan sistem hukum yang berbeda-beda. Pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan-Barat adalah sistem parental atau bilateral. Sedangkan sistem perkawinan yang terdapat pada suku Dayak adalah sistem endogami, dimana mereka dalam mengadakan suatu perkawinan antara satu sama yang lainnya hanya pada suku yang serumpun saja.

Pada dasarnya, hidup mereka ini terisolisir. Akan tetapi, lambat laun mereka mulai terbuka dengan pola hidup dari luar yang membawa perubahan-perubahan dalam segala bidang kehidupan, baik itu kebiasaan-kebiasaan mereka maupun dalam hal menggunakan alat-alat modern yang baru dikenal.

Hukum waris adat merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara pengoperan atau perpindahan barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud dari seseorang kepada keturunannya.

Menurut Soerojo Wignyodipoero dalam bukunya yang berjudul 'Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat' memberikan suatu rumusan hukum waris adat adalah : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang

manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>2</sup>

Demikian juga halnya dengan Ter Haar, beliau memberikan pengertian hukum adat waris adalah : Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu akan berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa harta warisan itu baru ada apabila seseorang yang mempunyai harta kekayaan dimana nantinya akan diberikan kepada ahli warisnya, baik semasa hidup sipewaris maupun setelah meninggal dunia.

Pada umumnya penulis berpendapat bahwa dalam pembagian warisan pada masyarakat dayak di Kalimantan-Barat mempunyai berbagai macam adat-istiadatnya terlebih dalam hal pewarisan.

Seperti pada suku dayak kanayatn terdapat 3 (tiga) corak kebudayaan yaitu adat-istiadat, seni budaya adat, dan hukum adat. Masyarakat adat dayak kanayatn di desa pahokng sejak dahulu sudah hidup dan berkembang hukum aslinya, yang dikenal dengan hukum adat. Salah satu dari hukum adat yang ada di dalam masyarakat tersebut adalah hukum adat waris.

Hukum adat waris pada masyarakat adat dayak kanayatn menganut sistem pewarisan individual seperti pada masyarakat adat dayak pada

---

<sup>2</sup> Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, Halaman 161.

<sup>3</sup> Ibid, Halaman 161.

umumnya yang merupakan masyarakat bilateral (parental) karena pada sistem pewarisan ini mengutamakan persamaan hak antara ahli waris, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, anak yang tertua maupun anak yang termuda, kecuali bagian anak yang memelihara orang tuanya lebih banyak bagiannya dari anak-anak yang lain.

Pada prinsipnya pembagian harta warisan terjadi apabila sipewaris meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Akan tetapi, menurut kebiasaan yang sudah turun temurun pada masyarakat tersebut, pembagian harta warisan dapat dilakukan pada waktu sipewaris masih hidup maupun sesudah sipewaris meninggal dunia.

Dalam suatu pembagian harta warisan, kadang-kadang timbul sengketa warisan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Hal ini dikarenakan ada ahli waris yang merasa tidak puas atas pembagian harta warisan atau ada ahli waris yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia terima. Jika hal tersebut terjadi, maka penyelesaiannya adalah melalui musyawarah antara ahli waris dengan sipewaris, kalau sipewaris masih hidup. Jika sipewaris meninggal dunia, maka yang berhak menyelesaikannya adalah fungsionaris adat.

Mengingat perkembangan yang terjadi dewasa ini, masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng juga mengalami perubahan dalam pola hidupnya serta hukum adatnya. Perubahan ini terutama mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam hukum adat waris yang telah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka secara turun temurun.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pewarisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak propinsi Kalimantan-Barat ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak propinsi Kalimantan-Barat ?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak propinsi Kalimantan-Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pewarisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak propinsi Kalimantan-Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada

masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak propinsi Kalimantan-Barat.

3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng kecamatan Mempawah Hulu kabupaten Landak propinsi Kalimantan-Barat.

#### **D. Kontribusi / Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Praktis.

Bagi masyarakat luas untuk lebih memahami atau lebih mengetahui bagaimana bentuk dari suatu struktur kekeluargaan atau kekerabatan dari masyarakat adat dayak kanayatn beserta perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan khususnya dalam sistem kekerabatan adatnya yang terjadi di dalam masyarakat adat dayak kanayatn.

2. Teoritis.

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu : tinjauan mengenai hukum keluarga dan tinjauan mengenai hukum waris adat, yang terbagi lagi dalam beberapa sub bab yaitu : mengenai pengertian hukum waris, mengenai sistem kewarisan adat, mengenai harta warisan, dan mengenai ahli waris.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu : gambaran umum, lokasi penelitian, perubahan sistem pewarisan pada masyarakat adat dayak Kanayatn di Desa Pahokng. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanyatn di Desa Pahokng dan penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu : kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Keluarga Adat**

Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek-nenek, anak-kemenakan, kebibikan, kemertuaannya, keiparan, dan kebesaran. Hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan Kekerabatan, yang tata hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat Kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

Hal demikian dijelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadikusuma, yang mengatakan bahwa :

Kaidah atau perilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan Kekerabatan, hubungan suami-isteri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak.<sup>4</sup>

Jadi hukum kekerabatan atau kekeluargaan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam Ikatan Kekerabatan.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam kutipannya dari Djoedigoeno mendefinisikan bahwa : Kekeluargaan adalah ketunggalan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Sarana Media, Jakarta 1987, hal 3.

leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain, Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, ada keturunan yang seorang dari yang lain.<sup>5</sup>

Dengan adanya suatu hubungan dari suatu keturunan, maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara, dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

Sebagaimana kita mengetahui di dalam masyarakat Indonesia, terdapat persekutuan-persekutuan, ada persekutuan dimana mempunyai hubungan kekeluargaan erat yang berdasarkan keturunan satu (1) nenek moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan tetapi berdasarkan daerah, wilayah yang didiami. Ada juga persekutuan-persekutuan yang diambil dari keduanya yaitu selain karena adanya hubungan kekeluargaan juga dikarenakan kesamaan daerah atau wilayah yang didiami.

Persekutuan-persekutuan demikian dimaksudkan untuk dapat mempunyai tujuan agar memiliki harta baik materiil maupun immateriilnya sendiri.

Persekutuan ini dapat disebut dengan Persekutuan Hukum.

---

<sup>5</sup> Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal. 108.

Ada penjelasan dari Soekanto tentang hubungan-hubungan di dalam suatu persekutuan, yaitu :

Bahwa di dalam masyarakat Indonesia, dahulu dan sekarang terdapat :

1. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan (genealogische factor) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian disebut dengan Persekutuan Hukum Geneologis (Genealogische Rectsgemeenschap).
2. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (grandgebied) yang tertentu dimana faktor teritair (Territoriale faktor), adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut Persekutuan Hukum Teritorial (Territoriale Rectsgemeenschap).
3. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor geneologis maupun faktor teritair mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan Hukum seperti ini disebut dengan Persekutuan Hukum Geneologis Teritorial. (Genealogisch Territoriale Rectsgemeenschap).<sup>6</sup>

Untuk di daerah Kalimantan, lebih banyak menggunakan persekutuan Geneologis dan teritair. Hal ini dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari Suku Dayak yang berorientasi di dalam kesehariannya yang selalu berhubungan satu dengan lainnya walaupun telah di luar kampungnya, mereka tetap membuat suatu perkumpulan keluarganya baik dalam satu

---

<sup>6</sup> Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soerocangan, Jakarta 1954, Hal 60.

perkumpulan yang dipautkan karena satu keturunan dalam satu silsilah keluarga, tetapi juga membuat suatu keterikatan kelompok berdasarkan asal tempat tinggal mereka.

Dalam bidang hukum waris belum ada kodifikasi dan unifikasi seperti dalam bidang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Oleh karena itu dalam garis besarnya dapat dikatakan, bahwa di negara Indonesia terdapat tiga macam hukum waris, yaitu menurut :

1. Hukum Adat.
2. Hukum Agama Islam.
3. Hukum Burgerlijk Wetboek (BW).

Sedangkan untuk ketentuan berlakunya hukum waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia Asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat.
2. Untuk Warga Negara Indonesia Asli yang beragama Islam diberbagai daerah terdapat Pengaruh Hukum Agama Islam.
3. Untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina berlaku Burgerlijk Wetboek (BW).

## **B. Hukum Waris Adat**

### **B.1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum asli Bangsa Indonesia adalah hukum adat yang lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat dapat berubah asal memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat adat serta menjamin tercapainya suatu keadilan.

Dalam masyarakat Indonesia mengenal adanya 3 sistem hukum waris, antara lain hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut KUHPerdara. Hukum waris adat sendiri mengandung makna dan pengertian yang beraneka ragam sampai saat sekarang.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, hukum adat juga mempunyai tempat yang khusus. Hal ini diatur dalam pasal II Aturan Peralihan, yang berbunyi : segala badan negara dan peraturannya yang masih berlangsung, sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam pasal II Aturan Peralihan tersebut diatas, maka hukum adat yang berlaku terhadap suatu masyarakat adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu sumber pembentukan hukum nasional ialah hukum adat yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, namun



berlakunya hukum adat itu masih bersifat lokal, yaitu berlaku didalam ruang lingkup tertentu dimana peraturan itu berada.

Dalam memberikan pengertian tentang hukum adat, Kusumadi Pudjisewojo mengemukakan pendapatnya, yaitu : adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam masyarakat (sesudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat di atas berarti bahwa berlakunya hukum adat ada yang menebal dan ada juga yang menipis. Menebal atau menipisnya hukum adat harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang ingin dicapai oleh masyarakat atau pendukung hukum adat tersebut. Walaupun kenyataannya demikian, perubahan itu tidak menutup kemungkinan dapat merugikan salah satu pihak anggota masyarakat dan menyebabkan hilangnya hak yang seharusnya ia miliki.

Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat, sebagian besar tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, akan tetapi sangat ditaati oleh masyarakat pendukung hukum adat tersebut. Soepomo memberikan pengertian tentang hukum adat, antara lain : hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif

---

<sup>7</sup> Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991, Halaman 14.

(unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat . Hukum waris adat merupakan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Kebiasaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya tidaklah sama, begitu juga mengenai ketentuan tentang hukum waris adatnya.

Dalam memberikan pengertian tentang hukum waris adat, Soepomo mengemukakan pendapatnya, yaitu : hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada pengertian hukum waris adat di atas, bahwa aturan-aturan pengoperan barang-barang warisan itu dilakukan dari generasi ke generasi secara terus menerus atau turun temurun. Mengenai barang-barang warisan, ada yang berwujud benda dan ada yang tidak berwujud benda.

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignydipoero, Pengantar dan Asas - asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, Halaman 14.

<sup>9</sup> Ibid, Halaman 161.

Sedangkan menurut Ter Haar, pengertian daripada hukum adat waris adalah : hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya Wirjono Projodikoro, memberi pengertian sebagai berikut: warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>11</sup>

Menurut Iman Sudiyat : hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.<sup>12</sup>

Dari pengertian hukum waris adat tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang bertujuan mengatur proses penerusan dan pembagian barang-barang secara terus menerus, baik yang berwujud benda (materiil) maupun barang-barang yang bukan berwujud benda (immateriil), dari pewaris kepada ahli warisnya.

---

<sup>10</sup> Ibid, Halaman 161.

<sup>11</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bale Bandung, Bandung, 1986, Halaman 8.

<sup>12</sup> Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 2000, Halaman 151.

Hal yang terpenting dalam masalah pewarisan adalah dengan terdapatnya 3 (tiga) unsur yang mutlak yang biasa dikenal sebagai unsur essensial. Adapun ketiga unsur tersebut antara lain:

1. seorang pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan 'in concreto' yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.<sup>13</sup>

Menurut Djodigono, terdapat asas-asas yang terkandung dalam ketentuan waris adat antara lain :

1. Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seorang manusia kepada angkatan tunas (generasi) yang menyusul.
2. Pewarisan tidak tentu berarti pembagian peninggalan itu, mungkin pembagiannya harus ditunda, mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan.
3. Dikenal lembaga hidup waris (plaatsvervulling).
4. Orang laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama haknya.
5. Tidak dikenal hibah pada orang yang sedianya mewaris, semua pemberian harus diartikan sebagai "pewarisan".

---

<sup>13</sup> Ibid, Halaman 162.

6. Harta peninggalan tidak terbatas pada barang-barang yang nyata dimiliki si peninggal harta pada saat matinya saja.<sup>14</sup>

Pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental, hukum waris adatnya menetapkan dasar persamaan hak yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memperoleh harta benda keluarga. Hukum waris adat juga meletakkan dasar ketentuan pada proses pelaksanaan pembagian harta warisan dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap ahli waris, karena pelaksanaan pembagiannya bisa ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

## **B.2. Sistem Kewarisan Adat**

Hukum adat tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, karena hukum adat tumbuh, berkembang, dan dipertahankan menurut kebutuhan masyarakat Indonesia.

Demikian pula halnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari suasana magis religius, dimana sejak dahulu mereka telah percaya bahwa dalam kehidupan mereka terdapat sesuatu yang gaib, yang mengatur kehidupan mereka.

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk-bentuk

---

<sup>14</sup> Irma Setyawati Socmitro, Beberapa Aspek Kewarisan Pada Kekerabatan Matrilineal, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, Halaman 43.

kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama kedalam negara Indonesia. Dengan adanya sistem keturunan yang berbeda-beda ini, membawa dampak pengaruh yang besar dalam sistem pewarisan hukum adat.

Hukum waris adat berhubungan erat dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga, karena akan mempengaruhi bentuk dari perkawinan dan sistem keturunannya. Hal tersebut dipertegas oleh Bushar Muhammad, yang menyatakan : sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa yang ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga dan susunan atau sistem keturunannya. Pendeknya seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Menurut pendapat di atas, jelaslah bahwa jika ingin memahami hukum waris terlebih dahulu harus mengetahui bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunannya. Dalam susunan kekerabatan adat maupun susunan kekeluargaan menurut sistem keturunannya, dapat dibedakan atas 3 (tiga) bagian besar, antara lain :

---

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Halaman 39.

1. Sistem Patrilineal atau sifat kebapakan.

Sistem ini pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali.

2. Sistem Matrilineal atau sistem keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia terdapat di satu daerah yaitu Minangkabau.

3. Sistem Bilateral atau Parental atau sifat kebapak-ibuan.

Sistem ini adalah merupakan sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga di dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di beberapa daerah antara lain di Jawa, seluruh Kalimantan, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Sulawesi, Ternate, Madura dan Lombok.<sup>16</sup>

Antara sistem keturunan yang satu dengan yang lain karena disebabkan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend.

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, *op cit.*, Halaman 5.

Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun dikalangan masyarakat pedesaan, masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan oleh Hazairin masih nampak kebenarannya. Beliau menyatakan : Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>17</sup>

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya.

Maka dengan demikian, oleh karena setiap masyarakat mempunyai berbagai macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam masyarakat tertentu sangat berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap kekayaan dalam masyarakat tersebut.

---

<sup>17</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an, Tinta Mas, Jakarta, Halaman 9.



Dalam hukum adat dikenal adanya 3 (tiga) sistem kewarisan seperti yang dikemukakan oleh Soerojo Wignyodipoero, sebagai berikut:

Di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan individual,

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

2. Sistem kewarisan kolektif,

Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem kewarisan mayorat,

Cirinya harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dan tanah Semendo di Sumatera Selatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, Halaman 165.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pewarisan tersebut antara lain :

*a. Sistem Pewarisan Individual.*

Sistem ini merupakan suatu sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini umumnya berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, yang tidak terikat kuat dengan rumah kerabat, rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota keluarga yang telah tersebar tempat kediamannya. Jadi cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris.

Pembagian warisan secara individual dianggap perlu dilaksanakan dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama. Para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota ahli waris telah tersebar tempat kediamannya.

Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas warisan yang menjadi bagiannya dan ia bebas untuk memindah tangankan hak warisannya itu kepada orang lain.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas

menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri ataupun menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatannya sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

*b. Sistem Pewarisan Kolektif.*

Merupakan suatu sistem dimana harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama. Harta tersebut biasanya disebut sebagai harta pusaka. Harta ini tidak

boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada ahli waris tersebut. Jadi harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris hanya berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Contoh dari sistem ini adalah terdapat di Minangkabau, dimana tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris sehingga para anggota famili hanya mempunyai pakai.

Sistem kolektif ini bisa saja berubah ke arah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah ke arah sistem

individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.

Kebaikan dari sistem kolektif ini adalah apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara keluarga yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab.

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat.<sup>19</sup>

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma, dimana beliau berpendapat : pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak di daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya ke dalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat, koperasi peternakan

---

<sup>19</sup> Ibid, Halaman. 39.

kerabat dan lain sebagainya, dimana rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya keadaan demikian seperti di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama.<sup>20</sup>

c. *Sistem Pewarisan Mayorat.*

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pada sistem mayorat, harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, apakah itu anak laki-laki tertua ataupun anak perempuan yang tertua.

Pada sistem pewarisan ini, penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Pada sistem pewarisan mayorat ini, anak tertua yang berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dan sebagai penerus tanggung jawab dari orang tua mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat hidup mandiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang baru. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya (di Lampung) atau ibunya (di Semendo).

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 1993, Halaman 28.

Seperti halnya dengan sistem kolektif, setiap anggota-anggota ahli waris dalam sistem pewarisan mayorat mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.<sup>21</sup>

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga mereka. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, jangan akan dapat mengurus harta

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, 1993, Halaman 29.

peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Tetapi, apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka “sifat individual atau kolektif maupun mayorat” dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>22</sup>

Sistem pewarisan kolektif dan mayoritas mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harta pusaka. Seperti yang dikemukakan Hilman Hadikusuma, dimana beliau berpendapat : pada umumnya sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> Sorjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, Halaman 286.



Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua di sana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan.<sup>23</sup>

### **B.3. Harta Warisan**

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ada pada waktu meninggalnya si pewaris. Dalam hukum waris adat, yang termasuk harta warisan itu tidak hanya benda-benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang saja, akan tetapi meliputi benda-benda berwujud lain yang mempunyai sifat "**Religio Magis**".

Harta warisan tidak merupakan satu kumpulan ataupun satu kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang itu masing-masing. Dan sekarang tergantung daripada sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari barang-barang yang

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *op cit*, Halaman 30.

ditinggalkan, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada para ahli waris.<sup>24</sup>

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma, harta warisan dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain : harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.<sup>25</sup>

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai keempat harta warisan tersebut antara lain :

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak awal, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Harta asal dapat dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama isteri atau suami

---

<sup>24</sup> Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, Halaman 176.

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *op cit*, Halaman 36

almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian, dan harta peninggalan yang dapat dibedakan dengan peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri. Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan, adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A. Hakim, barang-barang asal itu terdiri dari :

- a. Barang-barang sebelum perkawinan:
  1. Barang yang tiap isteri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
  2. Barang yang dipunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
  3. Barang yang diperoleh karena pewarisan.
  4. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan:
  1. Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
  2. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena

pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/isteri saja.<sup>26</sup>

Dengan demikian sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal-usulnya sudah ada sebelum perkawinan berupa harta pusaka, harta dari orang tua atau kerabat masing-masing, harta asal warisan atau pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, pengantian harta atau pertukaran harta dan lain sebagainya.

Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan Matrilineal yaitu adat Minangkabau, suami tidak berhak atas harta bawaan istri. Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1686k/Pdt/1995 tanggal 29 Juli 1996, bahwa : seorang istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka harta bawaan akan jatuh pada saudara-saudara

---

<sup>26</sup> S.A. HAKIM, Hukum Adat (Perorangan, perkawinan dan pewarisan), Stensilan, Jakarta, 1967, Halaman 32.

almarhumah istri tersebut, jadi suami tidak berhak atas harta bawaan istri.<sup>27</sup>

Pada masyarakat yang patrilineal, pada dasarnya harta bawaan dikuasai oleh suami yang berhak mewarisinya. Begitu pula sebaliknya bagi masyarakat yang matrilineal, jika ada harta bawaan suami pada dasarnya dikuasai oleh istri. Tetapi penguasaan atas harta bawaan itu tidak berarti mutlak oleh suami atau oleh istri, oleh karena setiap tindakan yang menguasainya harus dengan persetujuan suami atau istri yang bersangkutan, bahkan jika terjadi perselisihan akan dicampuri oleh anggota keluarga yang lain.

Dengan demikian dalam pewarisan menurut hukum adat ini barang pusaka yang keramat seperti keris, tombak dan sebagainya yang dianggap mempunyai kekuatan magis tidak dapat disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur.

Lain halnya dalam hukum adat bagi orang-orang Indonesia, kini ada kemungkinan bagi pengadilan untuk menolak pembagian suatu harta warisan, yaitu apabila menurut hukum adat di suatu tempat, harta warisan tertentu tidak dapat dibagi-bagi atau belum tiba saatnya untuk diadakan pembagian itu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1996, Halaman 272.

<sup>28</sup> Ibid, Halaman 21.

Harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagi selama masih diperlukan untuk penghidupan keluarga yang ditinggalkan (janda dan anak) yang masih tetap tinggal berkumpul.

Juga pada waktu harta peninggalan itu dibagi-bagi, diperhatikan pula apabila pewaris semasa hidupnya telah memberikan hartanya kepada beberapa orang anaknya, maka hal tersebut harus diperhitungkan dalam melakukan prinsip persamaan hak diantara semua anak.

Jika seorang anak telah mendapat bagian demikian banyaknya, maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dan apabila melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata si anak semasa bapaknya masih hidup baru menerima sedikit (belum cukup), maka ia akan mendapatkan tambahan pada ketika harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya.

Menurut hukum adat serta hukum Islam, pada hakikatnya apa yang beralih dari tangan si wafat kepada ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di Pulau Bali, misalnya, para ahli waris wajib membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut dalam waktu 40 hari sesudah pewaris meninggal dunia atau pada waktu “nyekah” (di Bali) yaitu selamatan bagi si mati.<sup>29</sup>

Menurut Ter Haar, bahwa kebanyakan daerah di Indonesia terutama di Jawa, hutang-hutang pewaris harus dibayar oleh para ahli waris. Barang-barang warisan yang mereka terima dianggap mencukupi untuk membayar hutang-hutang pewaris dibayar setelah biaya penguburan dibayar terlebih dahulu. Tagihan atau pemberitahuan tentang adanya hutang biasanya diharapkan masuk dalam tenggang waktu empat puluh hari setelah meninggalnya si berhutang. Mengenai pembayaran hutang dilakukan sebelum diadakan pembagian.

Harta peninggalan para ahli waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal :

- Masih ada orang tua,
- Terbatasnya harta peninggalan,
- Tertentu jenis dan macamnya,
- Pewaris tidak punya keturunan,

---

<sup>29</sup> Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, Halaman 7.

- Para waris belum dewasa,
- Belum ada waris pengganti,
- Diantara waris belum hadir,
- Belum ada waris yang berhak,
- Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.<sup>30</sup>

Apabila setelah pewaris wafat masih ada orang tua pewaris, janda atau dudanya yang masih hidup dan masih dapat mengurus harta peninggalan, baik untuk jaminan hidupnya maupun sebagai tempat berkumpulnya para waris, maka selama orang tua masih hidup harta peninggalan tidak dilakukan pembagian. Begitu pula dikarenakan terbatasnya harta peninggalan, misalnya dikarenakan pewaris hanya meninggalkan sebuah bangunan rumah dan pekarangannya sedangkan ahli waris banyak dan rumah dan pekarangan itu masih didiami dan diurus salah satu dari ahli waris, maka untuk kepentingan ahli waris yang bersangkutan harta peninggalan belum diadakan pembagian.

Adakalanya dikarenakan harta peninggalan itu menurut adat sudah tertentu jenis dan macamnya yang harus dibagikan kepada waris, maka jenis bagian harta peninggalan itu belum dibagikan, misalnya keris pusaka harus diwarisi oleh anak lelaki sedangkan si anak masih kecil. Begitu pula apabila waris tidak punya keturunan, sedangkan janda pewaris masih dapat mempunyai keturunan dari

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *op cit*, Halaman 44.



perkawinannya kemudian, maka pembagian atau penerusan harta peninggalan ditangguhkan sampai ada keturunan yang dapat mengganti pewaris.

Demikian pula jika ketika pewaris wafat sedangkan para ahli waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para ahli waris dewasa. Dalam hal ini sementara para ahli waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Begitu pula ada kalanya pewaris wafat sudah ada keturunan tetapi semuanya wanita, sedangkan harta peninggalan harus dimiliki oleh anak lelaki, maka pembagian atau penerusan harta peninggalan itu ditangguhkan sampai lahir cucu lelaki dari salah satu anak perempuan yang ditentukan untuk itu. Ahli waris pengganti dapat pula dilakukan dengan mengangkat kemenakan menurut urutan kedudukan orang tuanya.

Jika diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan pembagian harta peninggalan sedangkan ada diantaranya ahli waris yang diperlukan untuk itu belum hadir, maka pembagiannya dapat ditangguhkan sampai ahli waris bersangkutan dapat hadir. Demikian pula jika ketika diadakan pembagian warisan, masih ada ahli waris yang belum hadir sedangkan ia yang berhak mewarisi

peninggalan tertentu, atau ia yang berhak menentukan pembagian, maka pembagian warisan dapat ditangguhkan. Dan selanjutnya apabila hutang piutang pewaris ketika hidupnya belum diketahui banyak sedikitnya, siapa yang harus ditagih dan kepada siapa hutang harus dibayar, maka untuk memperhitungkannya dengan pembagian harta peninggalan yang ada pembagiannya dapat ditangguhkan.

Penangguhan waktu pembagian atau penerusan harta peninggalan ini dapat terjadi dan berlaku pada semua harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

## 2. Harta Pemberian

Harta pemberian merupakan harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

Sejak terjadinya perkawinan (sah atau tidak sah) ada kemungkinan suami memberikan sesuatu barang atau sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh isteri untuk menjadi milik pribadi isteri. Dikalangan masyarakat beragama Islam suami diwajibkan memberi maskawin berupa barang atau uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada isteri yang diberikan dengan tunai pada saat ijab-kabul atau ditangguhkan pembayarannya yang merupakan mas kawin hutang. Selama mas kawin hutang belum dibayar suami, ia merupakan tagihan isteri terhadap suami. Misalnya maskawin hutang berupa bangunan rumah yang harus dibuat suami untuk isteri, selama rumah belum dibuat, maka suami tetap mempunyai hutang rumah terhadap isterinya.

Sebagaimana dikemukakan di atas pemberian suami kepada isteri itu termasuk harta bawaan isteri yang jika terjadi putus perkawinan dapat dibawa kembali oleh isteri berpisah hidup dari suami. Jika perkawinan suami isteri itu perkawinan bebas maka peranan isteri terhadap harta bawaannya besar sekali, ia bebas melakukan perbuatan hukum atas hak miliknya itu, jadi berbeda dari ikatan perkawinan dengan jujur yang lebih banyak dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan suami. Adanya pemberian suami kepada isteri ini lebih nampak pada perkawinan lebih dari satu isteri.

Selama di dalam ikatan perkawinan, suami isteri berkemungkinan juga mendapat pemberian harta benda dari orang

tua mereka masing-masing untuk dipergunakan kedua suami isteri dan anak-anaknya bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri ataupun untuk cucu-cucu tertentu atau secara bersama-sama. Pemberian itu bukan saja pemberian antara orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari mertua untuk menantu. Pemberian tersebut dapat berupa barang tetap atau barang bergerak atau hanya berupa hak pakai.

Dilingkungan masyarakat yang menganut sistem pewarisan kolektif atau kolektif mayorat pemberian orang tua adalah dalam rangka penerusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, namun bukan tidak mungkin ada pemberian orang tua kepada anaknya tertentu yang bersifat pribadi untuk menjadi milik perseorangan. Di tanah Batak pemberian orang tua dalam hubungan dengan harta peninggalan tidak saja berlaku untuk anak sulung tetapi juga untuk anak bungsu. Di lingkungan masyarakat adat Dayak-Kendayan Kalimantan barat kemungkinan pemberian orang tua kepada anak, akan lebih banyak diberikan kepada anak pangkalan yaitu anak yang menjamin memelihara mengurus orang tua sampai wafatnya, tidak tertentu apakah anak sulung, anak tengah atau anak bungsu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Slamet Rahardjo, Existensi masyarakat hukum adat/desa ... khusus hukum adat suku Dayak Kendayan ... FH Univ. Tanjungpura Pontianak, Laporan penataran FH-UGM, 1978.

Bukan saja orang tua dapat memberi anak-anaknya yang pria atau wanita setelah mereka hidup berumah tangga sendiri, tetapi juga mertua kepada menantu. Di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak. Misalnya ibu mertua memberi menantunya barang pakaian wanita dan perhiasan wanita untuk menjadi milik atau hak pakai si menantu. Begitu pula di dalam bentuk perkawinan semanda nunggu atau semanda ngebabang adakalanya setelah adik isteri yang ditunggu menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri, maka sebagai tanda terima kasih mertua memberi menantu dan anaknya harta kekayaan berupa harta tetap atau harta bergerak untuk kehidupan suami isteri bersama selanjutnya berpisah dari tempat kediaman mertua<sup>32</sup>

Harta pemberian orang tua ini bagi keluarg-keluarga yang pada kenyataannya telah bebas dari pengaruh kekerabatan dimana fungsi dan peranan suami isteri yang lebih berpengaruh seharusnya dinilai sebagai harta bawaan (harta asal) yang harus kembali ke asal jika terjadi perceraian. Tetapi jika pengaruh orang tua / kerabat berdasarkan adat setempat masih kuat, maka penilaian harus dikembalikan menurut hukum adat yang biasa berlaku

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung, Bandung, 1977, Halaman 86.

### 3. Harta Pencaharian

Yang dimaksud harta pencaharian pada umumnya adalah semua harta yang didapat suami isteri bersama selama dalam ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan harta pencaharian putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, menyatakan bahwa, menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.<sup>33</sup>

Tetapi di dalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri dan atau milik isteri sendiri, dikarenakan latar belakang permasalahannya berlainan. Misalnya dikarenakan suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri demikian pula isteri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.

Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami isteri. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami

---

<sup>33</sup> Subekti/J. Tamara, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1965, Halaman 47.

sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami isteri. Dan apabila perkawinan mereka putus maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No. 120K/Sip/1960 harus dibagi sama rata antara suami isteri.

Harta pencaharian bersama suami isteri ini di dalam keluarga parental dengan perkawinan bebas sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau karena pewarisan.

Di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Batak, Lampung, Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian di dalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat isteri, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K/Sip/1958 menyatakan, menurut hukum adat Batak (yang bersifat patriarchaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghubungannya.<sup>34</sup>

Di daerah-daerah lain ada kemungkinan suami menguasai dan memiliki harta pencaharian yang didapatnya sendiri terlepas dari harta bersama keluarga suami isteri dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga memelihara isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>34</sup> Chidir Ali, Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak, Tarsito, Bandung, 1978, Halaman 69.

Jika harta pencaharian suami merupakan milik suami sendiri, maka yang menentukan pewarisnya adalah ia sendiri. Jika ia meninggal tanpa berpesan sesuatu tentang hartanya, sedangkan ia tidak mempunyai keturunan, maka harta pencaharian miliknya itu merupakan tambahan harta asal yang kembali pada keluarga asal. Dengan pengertian bahwa kerabat asalnya yang lebih berhak menentukan pembagian warisannya. Jika ia mempunyai keturunan maka semua keturunannya berhak mewarisi harta itu sebagai harta pencaharian orang tuanya.

Kedudukan isteri mempunyai harta pencaharian sendiri yang didapatnya karena ia bekerja dan berusaha sendiri, sebagai buruh tani (petani), pedagang atau karyawan lainnya lebih nampak pada keluarga-keluarga parental yang melakukan perkawinan bebas sederajat ataupun tidak sederajat. Begitu pula kedudukan isteri sebagai pemilik harta hasil pencaharian sendiri akan nampak pada masyarakat matrilineal, dalam bentuk perkawinan semanda, sedangkan pada masyarakat patrilineal kemungkinan itu ada pada keluarga-keluarga yang telah maju dimana pengaruh kerabat sudah lemah.

Pada dasarnya isteri dengan hak miliknya sendiri berhak untuk berbuat sendiri atas harta miliknya, ia bebas melakukan transaksi jual beli, pewarisan dan lain sebagainya dengan pihak lain atas harta miliknya, walaupun tanpa persetujuan dan bantuan



suaminya. Apalagi jika keluarga bersangkutan adalah keluarga rumah tangga yang terpisah karena suami mempunyai lebih dari satu isteri yang berdiri sendiri itu bersama harta gawannya kembali sebagai harta asal yang dapat diwariskan kepada anak-anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah atau tidak sah.

#### **B.4. Ahli Waris**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ahli waris adalah selaku orang-orang yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya seseorang berhubung dengan adanya suatu harta kekayaan yang tersedia untuk dipergunakan bagi keperluannya.

Dalam hukum waris adat untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi ahli waris dapat digunakan urutan keutamaan golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan ahli waris. Golongan pertama adalah keturunan ahli waris, golongan kedua adalah orang tua pewaris; golongan ketiga adalah saudara-saudara pewaris beserta keturunannya, golongan keempat adalah orang tua daripada orang tua pewaris (kakek nenek pewaris).<sup>35</sup>

Dengan adanya urutan golongan ahli waris tersebut di atas maka dapat ditentukan siapa yang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris. Dalam arti bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari

---

<sup>35</sup> Soerjono S. dan Yusuf Usman, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Halaman 19.

pada golongan lain (golongan pertama lebih diutamakan dari golongan kedua, ketiga, dan keempat, bila tidak ada golongan pertama maka golongan kedua lebih diutamakan dari pada golongan ketiga dan keempat, dan seterusnya).

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penggolongan ahli waris adalah sebagai berikut :

#### 1. Anak Kandung

Anak-anak menurut hukum adat adalah ahli waris utama dari seorang pewaris. Akan tetapi berhubung karena berbedanya sistem kekerabatan yang menjadi ajang hidup seseorang dan sistem perkawinannya, maka dalam kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan, antara lain :

- a. Pada masyarakat Matrilineal, misalnya di Minangkabau, dimana anak-anak menjadi anggota kaum ibunya, anak-anak mewaris dari ibunya. Dalam hal seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan harta pencaharian tanpa ada wasiat atau hibah wasiat, harta peninggalannya diwarisi oleh kaum kemenakannya, bukan kepada anak-anaknya.
- b. Pada masyarakat Patrilineal misalnya, Batak, dimana keluarga diliputi klan pancer laki-laki dan berlaku perkawinan dengan pembayaran jujur, istri mengikuti suami dan masuk ke dalam klan suami, anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi anggota klan suami.

Anak perempuan yang kawin dengan pembayaran uang jujur, tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Akan tetapi kepada mereka biasanya oleh orang tua diberi bekal, baik berupa tanah maupun barang-barang lain. Pada masyarakat ini harta warisan seseorang ayah diwarisi oleh salah seorang anak laki-laki (mayorat laki-laki) atau seorang anak perempuan (mayorat perempuan).

- c. Pada masyarakat Parental, misalnya, Jawa, Aceh, dan Sulawesi, kedudukan suami selaku ayah sama dengan kedudukan istri selaku ibu terhadap anaknya. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dengan mewaris harta orang tuanya.

## 2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Meskipun secara sosial anak angkat memperoleh perlakuan yang sama dengan anak kandung, namun dalam hal mewaris tidaklah selalu sama kedudukannya dengan anak kandung.

Khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenal anak angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan somahnya, lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan kerumahtanggaan antara orang tua angkat dan anak yang diangkat.

Hubungan ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.<sup>36</sup>

Untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan bagi anak angkat dikemudian hari, biasanya sebelum meninggal dunia orang tua angkat adakalanya telah memberikan warisan kepada anak angkatnya, sebagian dari harta kekayaannya.

Anak angkat menurut hukum adat di Jawa masih mewaris dari orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Sedangkan di kalangan orang Madura, anak angkat mutlak tidak mewaris lagi dari harta peninggalan orang tua kandungnya, tetapi mewaris dari orang tua angkatnya saja.

### 3. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti :

- Anak yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan.
- Anak yang dilahirkan sebagai akibat perbuatan zinah.
- Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak-anak tidak sah ini menurut pasal 43 (1) UU No. 1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut Undang-undang

<sup>36</sup> Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitra, Jakarta, 1977, Halaman 84.

anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai waris dari ayah biologisnya.

Di Minahasa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah (baku piara) dapat diperlakukan sama dengan anak yang sah sebagai waris dari ayah yang melahirkannya setelah adanya tanda pengakuan anak yang disebut mehelilikur.<sup>37</sup>

#### 4. Anak Tiri

Anak tiri yang menjadi anggota keluarga ayah atau ibu tirinya mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Tetapi anak tiri bukanlah waris dari bapak atau ibu tirinya. Walaupun demikian anak tiri ini ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda.<sup>38</sup>

Anak tiri yang diangkat menjadi anak oleh ayah tirinya (Kalimantan, Minahasa) berhak atas harta peninggalan ayah tiri yang mengangkatnya.

#### 5. Janda atau Duda

Seorang janda pada dasarnya bukan ahli waris. Hal ini didasarkan pada pangkal pikiran hukum adat bahwa istri sebagai orang luar, tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *op cit*, Halaman 68.

<sup>38</sup> Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, Halaman 189.

istri ia berhak mendapat nafkah hidup dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya.<sup>39</sup>

Sesungguhnya kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris atau bukan ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1960, Nomor 302K/SIP/1960, berkesimpulan bahwa :

Hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indoensia, di samping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang, warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan.

Keputusan Mahkamah Agung ini cukup beralasan. Jika diingat bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri hidup secara bersama-sama baik dalam suka maupun duka, yang mana

---

<sup>39</sup> Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia, Remadja Karya, Bandung, 1985, Halaman 45.

akan menimbulkan adanya hubungan lahir dan batin yang begitu eratny antara suami istri tersebut, yang melebihi hubungan kekeluargaan antara suami dengan saudara-saudaranya. Sehingga sudah sepantasnya jika seorang janda diberi bagian atas warisan almarhum suaminya.

#### 6. Hibah Wasiat

Dalam kehidupan masyarakat terdapat kebiasaan bahwa apabila ada anak yang kawin dan hidup berumah tangga secara terpisah dari orang tuanya, kepadanya akan diberi bekal pokok untuk membentuk rumah tangga baru itu. Pemberian-pemberian yang berasal dari harta keluarga itu dimaksudkan sebagai permulaan pembagian pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pembagian warisan kepadanya berhubung kepergiannya dari keluarga dan masuk ke dalam klan suaminya yang mengakibatkan hak mewaris di dalam keluarga dan klan orang tua kandungnya menjadi hilang.

Pemberian ini mengakibatkan bahwa barang yang diberikan telah berpindah kepada pihak yang diberi. Tindakan ini disebut pemberian Hibah (Jawa), Hibah Laleh (Minangkabau) atau Holingate (Batak Karo).

Apabila bagian harta peninggalan tertentu diberikan oleh pewaris kepada seseorang yang bukan ahli waris misalnya : anak asuh, anak pungut, anak tiri dan sebagainya, maka pemberian itu

adakalanya disebut hibah. Jika peralihan hak miliknya baru berlaku setelah pewaris wafat adakalanya disebut hibah wasiat. Hibah wasiat ini bisa juga terjadi pada suami kepada istrinya, atau dari paman kepada kemenakann.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuman, *op cit*, Halaman 232.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Suatu metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap penelitian dalam suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya, oleh karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

##### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat dayak dan meninjau lebih jauh untuk melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke hukum yang lebih modern dan yang terus mengikuti perkembangan zamannya serta hukum adat itu sendiri dengan eksistensinya dalam hukum nasional.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dalam perkembangan masyarakat adat dayak yang masih berada di bawah naungan hukum adatnya, baik itu dibidang kekeluargaan maupun dibidang pewarisan. Dengan adanya pendekatan ini, penulis meninjau dari

segi gejala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan, atau mengungkapkan sistem hukum adat hukum setempat yang mencakup tentang kekeluargaan dan pewarisan serta perkembangan hukum adat itu sendiri di dalam eksistensinya terhadap masyarakat yang tergabung dalam wilayah Republik Indonesia dengan aturan hukum yang berlaku bagi masyarakatnya. Kemudian dari seluruh proses penelitian ini, akan berakhir dengan penarikan suatu kesimpulan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pahokng, Kabupaten Landak, Kecamatan Mempawah Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, dengan kriterianya: Bahwa di Desa Pahokng, Suku Dayak Kanayatn mempunyai latar belakang sejarah yang sangat dalam dimana dahulu merupakan suatu sejarah kerajaan yang sampai sekarang masih dapat ditemukan. Masyarakat adat Dayak yang menetap di desa Pahokng, keseluruhannya adalah merupakan suku Dayak Kanayatn.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan suatu data yang langsung diperoleh dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang kekeluargaannya dan pewarisan.
2. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan sebagainya.

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas 2 (dua) golongan, yaitu : Data primer dan Data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan-peraturan perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para

sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.<sup>41</sup>

## **E. Penentuan Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro : populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>42</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, Kabupaten Landak, Kecamatan Mempawah Hulu, yang berjumlah 308 Kepala Keluarga (KK).

### **b. Sampel**

Dengan demikian penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling. Purposive Sampling atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan biaya, keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

---

<sup>41</sup> Ibid, Halaman 52 – 53.

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Halaman 44.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis, yaitu : penggunaan teknik Purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang tertentu telah didapat dari populasi sebelumnya.<sup>43</sup>

Mengenai besarnya sampel yang diambil, penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, yang menyatakan : untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 % sampai dengan 15 % atau 20 % sampai dengan 25 % atau lebih.<sup>44</sup>

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Satu (1) orang Tumenggung Banua Pahokng Hulu.
2. Satu (1) orang Tumenggung Banua Pahokng Hilir.
3. Satu (1) orang Kepala Desa.
4. Tiga puluh satu (31) orang warga masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.

---

<sup>43</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Halaman 58.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Halaman 120.

## **F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### *1. Wawancara atau Interview*

Dalam memperoleh data, penulis sangat berpatokan pada hasil wawancara atau interview yang didapat. Wawancara itu sendiri dilakukan untuk mempertegas data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini.

Wawancara tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi yang menjadi sampling dalam penulisan dalam penulisan ini, yaitu : Kepala Desa dan Ketua Adat, serta masyarakat suku Dayak Kanayatn yang tinggal di Desa Pahokng.

Pelaksanaan wawancara ini menggunakan sistem wawancara tak terstruktur. Dalam hal ini, penulis, penulis sebagai pewawancara menetapkan sendiri permasalahan-permasalahan yang kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Maksud dari wawancara tak terstruktur tersebut adalah karena responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas dimana responden memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Menurut Lexi. J. Moleong, wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan-keadaan berikut :

1. Bila wawancara berhubungan dengan orang penting.

2. Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seseorang subjek tertentu.
3. Apabila pewawancara menyelaraskan kegiatan yang bersifat 'penemuan'.
4. Jika ia tertarik untuk memperoleh bagian-bagian tertentu yang tak normal.
5. Apabila ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seorang responden.
6. Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu.<sup>45</sup>

## 2. *Pengecekan Keabsahan Data*

Dalam penulisan ini, cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada orang-orang yang masuk ke dalam sampling dan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh tersebut, maka penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu suatu teknik dimana untuk memeriksa keabsahan suatu data penulis memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan yang dipakai sebagai pembandingan dari data yang diperoleh.

Lexy. J. Moleong berpendapat bahwa : bahwa teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya,

---

<sup>45</sup> Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Halaman 138.

Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan sistem pemeriksaan keabsahan data melalui sumber, yaitu dengan jalan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Disini yang diperbandingkan adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- b. Data hasil pengamatan adalah data yang diperoleh pada saat penelitian, baik itu data yang telah ada maupun data yang diperoleh secara langsung yang dilihat dalam perkembangan masyarakat suku Dayak Kanayatn, yang mana kemudian diperbandingkan dengan wawancara dari pihak-pihak yang merupakan sampling dalam penulisan ini.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, yaitu pendapat dan pandangan dari ketua adat dan kepala desa, yang kemudian diperbandingkan dengan dengan masyarakat suku Dayak Kanayatn pada umumnya.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Disini perbandingan dilakukan atas wawancara oleh penulis kepada pihak-pihak yang dijadikan sampling dengan data-data dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>46</sup> Ibid, Halaman 178.



Tetapi dalam hal ini, menurut pendapat Lexy. J. Moleong bahwa : dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran, yang penting disini adalah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton 1987:331).<sup>47</sup>

Selain melalui sumber pengecekan keabsahan data, dapat dilakukan dengan teknik triangulasi dengan teori, dimana didasarkan pada suatu anggapan bahwa suatu fakta tertentu tidak dapat diperiksa keabsahan datanya dengan membandingkan dari satu atau lebih suatu teori.

Hal tersebut dijelaskan oleh Lexy. J. Moleong, yang mengatakan bahwa : jika peneliti membandingkan hipotesis pembanding dengan penjelasan pembanding, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu, melainkan peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika penulis gagal menemukan 'bukti' yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli, hal itu merupakan penjelasan 'utama' peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi, jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid, Halaman 178.

<sup>48</sup> Ibid, Halaman 179.

## G. Analisis Data

Dalam penulisan ini menerapkan analisis kualitatif, sehingga untuk menggambarkan keabsahan data yang telah dinyatakan valid, maka dibuatlah acuan dasar yang berupa proses pelaksanaan untuk menganalisa data. Dalam pengolahan suatu data dilakukan dengan jalan yaitu dari data yang telah dikumpulkan dan telah diperiksa keabsahannya, serta dinyatakan valid, maka akan diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu :

1. Reduksi data
2. Display data.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hal ini diperjelas oleh Nasution. S. yang mengemukakan bahwa : reduksi data adalah data yang diperoleh dilapangan, ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Display data adalah data yang terkumpul dan telah direduksi, dibuatkan matriknya, grafik, network, dan charts, agar data dapat dikuasai. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nasution. S, Metode penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, Halaman 9.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A.1. Letak Desa Pahokng**

Desa Pahokng terletak  $\pm$  3 km dari Ibukota Kecamatan Mempawah Hulu. Desa Pahokng terdiri dari 2 (dua) Banua yaitu : Banua Pahokng Hulu dan Banua Pahokng Hilir yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang temenggung atau ketua adat dan desa tersebut dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala desa.

##### **A.2. Batas Wilayah Desa Pahokng**

Secara geografis wilayah Desa Pahokng berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Karangan (Ibu Kota Kecamatan Mepawah Hulu) dan Desa Mentonyek.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilanyuk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babant
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tunang.

##### **A.3. Penduduk**

Salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Mempawah Hulu adalah Desa Pahokng yang mayoritas penduduknya suku Dayak Kanayatn asli. Di samping suku dayak Kanayatn ada juga suku lainnya seperti, Melayu, Jawa

dan Tiong Hwa yang merupakan pendatang, kemudian menetap dan membentuk rumah tangga baru bersama penduduk asli.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk yang terdapat di Desa Pahokng adalah berjumlah 312 orang, terdiri dari penduduk yang bersuku Dayak Sebanyak 308 orang, suku Jawa 2 orang, suku Melayu sebanyak 1 orang, dan suku Tiong Hwa sebanyak 1 orang.

Pada umumnya, penduduk yang mendiami atau yang berdomisili di Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak menganut agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Bahasa yang digunakan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari disamping bahasa Melayu, juga digunakan bahasa daerah mereka sendiri yang mempunyai logat dan ciri khas tertentu, yaitu bahasa Dayak Kanayatn.

## **B. PERUBAHAN SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAHOKNG**

### **B.1. Cara-cara dan Proses Pewarisan**

Hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn menganut sistem pewarisan individual seperti pada masyarakat Dayak pada umumnya yang merupakan masyarakat bilateral (parental), karena pada sistem pewarisan ini mengutamakan persamaan hak antara ahli waris baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, anak yang tertua maupun anak yang termuda, kecuali bagian anak yang memelihara orang tuanya lebih banyak bagiannya dari anak-anak yang lain.

Pada prinsipnya pembagian warisan terjadi apabila si pewaris meninggal dunia dan mengambilkan sejumlah harta kekayaan. Akan tetapi, menurut kebiasaan yang sudah turun temurun pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pahokng, pembagian harta warisan dapat dilakukan pada waktu si pewaris masih hidup maupun sesudah si pewaris meninggal dunia, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat  
Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
A	Sebelum pewaris meninggal	-	-
B	Setelah pewaris meninggal	-	-
C	Dapat dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia	31	100
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa 31 responden (100%) menjawab bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan dapat pula dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan dapat pula dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, pembagian ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dan kesepakatan antara si pewaris dan ahli waris. Apabila si pewaris masih hidup maka yang berhak membagi harta kekayaan itu si pewaris sendiri dan sebaliknya apabila si pewaris telah meninggal dunia maka yang berhak untuk membagikan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah janda atau duda dari

pewaris dan apabila si pewaris (suami atau istri) telah meninggal keduanya, maka ditunjuk salah satu ahli waris oleh para ahli waris sebagai kepala waris yang berhak membagi harta warisan orang tuanya (si pewaris).

### **B.1.1. Sebelum Pewaris Meninggal**

Pengoperasian atau pembagian harta warisan tidak hanya dilakukan dalam suasana kematian, tetapi dapat pula dilakukan pada saat pewaris masih hidup.

Pembagian harta warisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, tujuannya adalah :

1. Agar para ahli waris dapat menikmati harta warisan dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Untuk menghindari terjadinya penguasaan harta benda oleh seseorang ahli waris di kemudian hari.
3. Untuk menghindari terjadinya sengketa di dalam pembagian harta warisan.

Proses pewarisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Dengan Cara Penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan pembagian harta warisan dengan cara penunjukan kepada masing-masing ahli waris untuk mendapatkan bagiannya. Pembagian harta

warisan ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan musyawarah atas dasar kerukunan serta dalam suasana damai.

Apabila harta benda si pewaris telah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya berarti pada saat itu telah terjadi penguasaan dan kepemilikan harta kekayaan si pewaris oleh ahli waris walaupun belum sepenuhnya. Perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya atas harta kekayaan baru dimiliki dan dikuasai sepenuhnya setelah si pewaris meninggal dunia.

## 2. Dengan Cara Wasiat (pesan)

Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, ada kalanya seseorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup, lalu berpesan kepada para ahli warisnya bahwa yang berhak untuk mengurus rumah pangkalatn (rumah orang tua) adalah anaknya yang merawat atau mengurus si pewaris dari masa hidup sampai si pewaris meninggal dunia. Pesan ini tidak hanya tertuju pada siapa yang berhak mendapatkan rumah pangkalatn tetapi juga termasuk harta pusaka yang mengandung nilai magis seperti mandau, tangkitn, tombak diserahkan pengurusannya kepada anak tertua laki-laki.

### B.1.2. Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng dapat dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia baik itu pada malam pertama maupun malam ketiga yang meninggal dunia

dikebumikan, mengenai waktunya ini tergantung musyawarah para ahli warisnya. Pada malam pembagian harta warisan para ahli waris berkumpul di rumah orang tuanya yang meninggal, dalam pembagian itu tentunya dilaksanakan dengan musyawarah dan penuh rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi hak para ahli waris. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2  
Cara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat  
Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
a	Dilakukan secara kekeluargaan	18	58,06
b	Dilakukan secara musyawarah	13	41,94
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa 18 responden (58,06%) menjawab pembagian harta warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan antara si pewaris dengan para ahli waris, sedangkan 13 responden (41,94%) menjawab pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan ketua adat sebagai penengah dalam musyawarah tersebut. Jika pewaris telah meninggal dunia maka pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah antar ahli waris saja yang dipimpin oleh satu orang kepala waris yang mereka (para ahli waris) tunjuk. Apabila di dalam pembagian itu belum didapatkan kepastian masing-masing ahli waris, mereka dapat mengundang Temenggung (ketua adat) untuk membagi-bagikan harta warisan tersebut. Berdasarkan kebiasaan



masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng pada dasarnya setiap ahli waris memiliki hak yang sama antara sesama ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, kecuali anak panunggu pangkalatn bagiannya lebih banyak karena anak pangkalatn ditunjuk oleh pewaris untuk mengurus (merawat) orang tuanya dari semasa hidupnya sampai si pewaris meninggal dunia.

Anak panunggu pangkalatn adalah anak yang mendiami rumah pangkalatn (rumah orang tuanya).

Dengan demikian, pembagian harta warisan dapat dilakukan sesudah si pewaris meninggal dunia dengan syarat si pewaris ada meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang menerima harta warisan itu.

Pelaksanaan pembagian harta warisan ini dipimpin oleh suami atau istri si pewaris yang masih hidup dan jika kedua-duanya sudah tidak ada maka yang berhak untuk membagi-bagikan harta itu adalah kepala waris. Kepala waris adalah saudara yang dituakan dari para ahli waris yang lain. Setelah dimusyawarahkan Kepala waris mempersilakan anak panunggu pangkalatn mengambil bagiannya itu hanya tertuju pada alat-alat perabot rumah tangga, sedangkan harta yang ada di luar rumah pembagiannya sama rata.

Apabila ada ahli waris yang telah melangsungkan perkawinan dan menetap di luar harta warisan itu berada maka tidak mutlak lagi untuk mendapatkan harta dari orang tuanya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng

Menurut Slamet Rahardjo : Khusus Hukum Adat Suku Dayak Kanayatn Kalimantan Barat kemungkinan pemberian orang tua kepada anaknya akan lebih banyak diberikan kepada anak pangkalatn yaitu anak yang menjamin, memelihara dan mengurus orang tuanya sampai si pewaris meninggal dunia, tidak tentu apakah anak sulung, anak tengah atau anak bungsu.

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa bagian dari anak panunggu pangkalatn lebih banyak dibandingkan dengan para ahli waris yang lain, karena anak panunggu pangkalatn inilah yang lebih banyak memberikan perhatian terhadap orang tuanya dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit.

## **B.2. Harta Warisan**

Seperti halnya pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng menganut sistem keturunan parental atau bilateral, artinya ahli waris ahli waris dapat mewaris secara individual. Dikatakan mewaris secara individual artinya masing-masing ahli waris berhak untuk mendapatkan harta warisan yang dibagi-bagikan, sedangkan yang dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris adalah harta pusaka orang tua.

Adapun harta pusaka orang tua yang dimaksud tersebut antara lain : Kompokng angkabang (kebun tengkawang), timawakng (tembawang) dan harta pusaka yang jumlahnya sedikit seperti tempayan antik, lela dan lainnya, sedangkan harta pusaka yang mempunyai nilai magis seperti

tangkai (parang pusaka) mandau dan tombak diserahkan pengurusannya pada anak laki-laki. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka harta pusaka yang mempunyai nilai magis tersebut diberikan kepada saudara si pewaris yang laki-laki.

Pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng mengenal 2 (dua) bentuk warisan, yaitu :

#### 1. *Harta Bagian Urakng Tuha*

Yaitu harta warisan yang merupakan harta peninggalan dari orang tua yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris, dimana setiap ahli waris mempunyai hak yang sama dalam pembagian tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan, anak yang tua maupun yang muda, terkecuali anak yang memelihara orang tuanya berhak mendapat bagian yang lebih. Harta warisan ini meliputi : kabon gatah (kebun karet), tanah papuk (tanah sawah), tanah uma (tanah ladang) dan ternak (sapi, babi dan kambing).

#### 2. *Harta Pusaka Urakng Tuha*

Yaitu harta kekayaan orang tua yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Mengenai harta pusaka ini dapat digolongkan dalam 2 (dua) kategori, antara lain :

##### a. Ada yang dapat dibagi-bagikan

Apabila jumlah harta pusaka ini banyak, para ahli waris dapat memilikinya. Contohnya : pahar (sejenis piring berkaki, terbuat dari tembaga), talam (sejenis piring besar tanpa kaki, terbuat dari

tembaga), agukng (gong), dau (gamelan), topokng atau salapa (tempat sirih terbuat dari tembaga) dan langke' (ikat pinggang dari perak).

b. Ada yang tidak dapat dibagi-bagikan

Mengenai harta ini ada yang dimiliki oleh kerabat ahli waris dan ada yang diurus oleh seorang ahli waris saja. Harta warisan yang dimiliki oleh kerabat seperti : timawakng (tembawang), kompokng angkabang (kebun tengkawang) dan harta pusaka yang jumlahnya sedikit seperti tempatnya antik, lela dan lainnya, sedangkan harta pusaka yang mengandung nilai magis seperti : tangkitn (barang pusaka), mandau dan tombak diserahkan pengurusnya kepada anak laki-laki.

Adapun hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3  
Bentuk Harta Warisan Yang Terdapat di Dalam Masyarakat  
Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
a	Semua harta warisan dapat dibagi-bagikan	-	-
b	Tidak semua harta warisan dapat dibagi-bagikan	31	100
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa 31 responden (100%) menjawab tidak semua harta warisan dapat

dibagi-bagikan kepada para ahli waris, karena di dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn harta warisan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu harta bagian urakng tuha (harta yang dapat dibagi-bagikan) seperti; tanah sawah, tanah ladang, kebun karet, emas, ternak dan lainnya, sedangkan golongan yang kedua yaitu harta yaitu harta pusaka urakng tuha (harta pusaka) seperti rumah pangkalatn (rumah orang tua), mandau, lela dan yang lainnya tidak dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris dan yang berhak menyimpan harta pusaka itu hanyalah anak panunggu pangkalatn sedangkan ahli waris yang lainnya hanya mempunyai hak pakai saja.

Harta pusaka urakng tuha seperti rumah pangkalatn (rumah orang tua) diserahkan pengurusannya kepada anak yang memelihara orang tuanya dari masa tuanya sampai meninggal dunia. Anak yang mendiami rumah ini disebut anak panunggu pangkalatn atau anak panunggu karamigi.

Anak panunggu pangkalatn tidak hanya ditujukan kepada anak perempuan saja akan tetapi anak laki-laki juga berhak untuk mendiami rumah orang tuanya asalkan anak tersebut memelihara orang tuanya dari masa hidup sampai meninggal dunia.<sup>51</sup>

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng disebabkan karena harta warisan tersebut merupakan milik kerabat / famili serta disebabkan karena harta itu juga

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Z (Ketua Adat Masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng)

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagikan dan memang jumlah harta peninggalan itu sedikit.

Mengenai harta pusaka seperti lela (meriam kecil), siam (tempayan antik), langor (piring antik), selapa (tempat sirih dari tembaga) dan langke' (ikat pinggang dari perak) apabila jumlahnya sedikit maka harta tersebut akan diurus oleh anak penunggu pangkalatn. Sedangkan tembawang, kebun tengkawang, kebun durian diurus oleh para ahli waris yang menetap dimana harta itu berada secara bersama dengan ahli waris lainnya.

Pengertian timawakng (tembawang) itu sendiri adalah bekas perkampungan yang ditinggalkan dimana terdapat tanaman seperti durian, rambutan, langsung dan berbagai buah lainnya.

Dalam masyarakat adat Dayak Kayanatn di Desa Pahokng, harta perkawinan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

a. Harta bawaan masing-masing pihak

Yaitu : barang-barang atau harta yang diperoleh sebelum dilakukannya perkawinan yang didapatkan secara warisan. Dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut "Pangincakng babaro."

b. Harta yang didapat suami atau istri atas usahanya sendiri yang dibawa dalam perkawinan atau panamuan babaro.

c. Harta yang didapat suami istri selama perkawinan yang merupakan harta bersama atau panamuan dua laki bini.

d. Harta yang diperoleh kedua suami istri berupa hadiah atau pamarek dangan.

Berdasarkan keempat bentuk harta perkawinan di atas, yang merupakan harta bagian urakng tuha adalah harta yang diperoleh sebelum dilakukannya perkawinan yang didapatkan secara warisan atau pangincakng babaro, sedangkan yang merupakan harta pusaka urakng tuha adalah harta yang dibawa suami istri dalam suatu perkawinan yang mana harta bawaan itu didapat secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Sebelum harta warisan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya maka terlebih dahulu diketahui bahwa apakah harta warisan itu merupakan harta bawaan suami atau istri yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi atau harta yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris.

Jadi dapatlah diketahui bahwa apabila terjadi perkawinan antara suami istri masing-masing membawa barang asal, maka barang atau harta kekayaan tersebut menjadi milik bersama selama masih terikat tali perkawinan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng telah mengalami perubahan, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4  
Ketentuan Hukum Adat Waris Dalam Pembagian  
Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak  
Kanayatn di Desa Pahokng

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
a	Mengalami perubahan	31	100
b	Tidak mengalami perubahan	-	-
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa 31 responden (100%) menjawab pembagian harta warisan pada saat itu mengalami perubahan terutama ketentuan yang menyatakan bahwa ahli waris yang telah kawin, kemudian menetap dan bertempat tinggal di luar harta warisan itu berada, tidak mutlak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Walaupun ketentuan hukum adat waris Dayak Kanayatn di Desa Pahokng telah mengalami perubahan, namun masyarakatnya masih mempertahankan hukum adat waris tersebut, karena hukum adat waris itu sesuai dengan kebutuhan hukum dan memerlukan rasa keadilan serta ketentraman di dalam kehidupan pendukung hukum adat.

### **B.3. Ahli Waris**

Demikian juga halnya dengan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng mengakui adanya persamaan kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris, begitu juga dengan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pembagian harta warisan orang tuanya.

Pada umumnya, ahli waris yang telah kawin, kemudian menetap dan bertempat tinggal di luar harta warisan itu berada, tidaklah mutlak untuk mewarisi harta warisan tersebut. Hal ini terbukti dari jawaban responden sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 5  
Ahli Waris Yang Telah Kawin Kemudian Menetap dan  
Bertempat Tinggal di Luar Harta Warisan Itu Berada

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
A	Masih mutlak	5	16,12
B	Tidak mutlak	26	83,88
n = 31		31	100,00

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa 5 responden (16,12) memberikan jawaban ahli waris yang telah kawin kemudian tidak menetap dan bertempat tinggal di mana harta warisan itu berada masih mutlak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena orang tuanya beranggapan bahwa ahli waris (anak-anaknya) harus diperlakukan secara adil agar tidak terjadi sengketa warisan di kemudian hari, kecuali jumlah harta warisan itu sedikit maka hanya diberikan kepada anak yang memelihara orang tuanya (si pewaris). Sedangkan 26 responden (83,88%) menjawab tidak mutlak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, karena ahli waris itu dianggap sudah mampu membiayai kehidupannya sendiri. Oleh sebab itu harta warisan itu hanya diberikan kepada anak-anak (ahli waris) yang masih tinggal dan menetap dimana harta warisan itu berada, kecuali anak si pewaris itu kembali ke tempat harta itu berada, ia mutlak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa anak yang telah kawin kemudian menetap dan bertempat tinggal di luar harta warisan itu

berada bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dan bisa juga tidak, hal ini tergantung di mana ahli waris itu berdomisili.

Masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng menganut sistem keturunan parental atau bilateral, dimana anak kandung memegang peranan sangat penting sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari ahli waris adalah anak kandung dari si pewaris.

Kedudukan anak kandung sangat penting sekali sebagai ahli waris dari orang tuanya. Pada dasarnya pembagian harta warisan harus dilaksanakan atas dasar kerukunan antar para ahli waris yang berhak menerima bagian yang sama dan seimbang. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan harus didasarkan pada asas kerukunan dan ketentuan-ketentuan hukum adat waris. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sengketa warisan antara para ahli waris.

Menurut ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng bahwa yang berhak sebagai ahli waris, antara lain:

*1. Anak Gara atau Anak Puhun (anak kandung dari pewaris)*

Anak kandung merupakan keturunan langsung dari pewaris dan merupakan ahli waris yang paling utama dalam hukum waris, dimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya, sebab anak kandung memiliki hubungan darah yang sangat dekat sekali dengan si pewaris.

Orang perorangan sebagai keturunan di dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh atau tidak ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan orang tuanya, karena pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng anak kandung tidak semestinya dapat mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Pengecualian ini berlaku apabila :

- a. Anak tersebut mencoba untuk membunuh orang tuanya (pewaris),
- b. Anak tersebut mempengaruhi orang tuanya agar dalam pembagian harta warisan dilakukan secara tidak adil,
- c. Anak tersebut berusaha untuk merusak barang harta warisan dengan sengaja,
- d. Perbuatan anak tersebut dapat merugikan pewaris dan ahli waris yang lainnya, seperti menjual harta warisan tanpa sepengetahuan orang tua dan ahli waris yang lainnya.

Sebagai ahli waris utama dari orang tuanya, kedudukan anak harus dibedakan apakah ia menganut pola keturunan matrilineal atau menganut pola keturunan patrilineal, karena pola ini akan menentukan haknya sebagai ahli waris yang mutlak. Jika si anak menganut pola keturunan matrilineal maka anak yang mewaris adalah anak perempuan, dan sebaliknya jika ia menganut pola keturunan patrilineal yang mewarisi adalah anak laki-laki.

Di dalam hukum adat juga mengenal pola keturunan parental atau bilateral yang mana pola ini mengutamakan persamaan hak mewaris antara

anak laki-laki dengan anak perempuan. Pola keturunan ini dianut oleh masyarakat adat Dayak Kanayatn yang berdiam di Desa Pahokng dengan tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan sebagai ahli waris dan mereka berhak mendapat bagian yang sama dari harta kekayaan orang tuanya.

Menurut kebiasaan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak kandung apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun hukum adatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat tersebut mengakui adanya 2 (dua) corak perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan perkawinan yang dilakukan secara adat.

## *2. Balu Bini atau Balu Laki (janda atau duda dari pewaris)*

Apabila pewaris meninggal dunia, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah anak-anaknya dan selain itu janda (balu bini) atau duda (balu laki) juga berhak mewarisi harta kekayaan peninggalan si pewaris bersama anak-anaknya.

Jika yang meninggal pewaris perempuan, maka duda dari pewaris juga berhak untuk mendapatkan harta warisan dari mendiang istrinya. Demikian juga halnya dengan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, apabila istrinya meninggal dunia, maka “balu laki” (duda) dapat mewarisi harta peninggalan mendiang istrinya karena masyarakat adat tersebut menganut pola keturunan parental atau bilateral yang menyatakan

bahwa kedudukan janda atau duda dalam hal pewarisan adalah seimbang atau sederajat dengan anak-anaknya.

### 3. *Ahli Waris Selain Anak Kandung, Janda atau Duda*

Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng mengenal juga ahli waris yang lain, seperti :

#### a. *Ahli Waris Anak Tere (anak tiri)*

Anak tere (anak tiri) ini adalah anak yang dibawa oleh salah satu pihak baik suami maupun istri ke dalam suatu perkawinan. Anak ini biasanya dibawa sejak awal mula perkawinan. Menurut kebiasaan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, anak tere (anak tiri) dapat mewaris dari orang tua kandungnya atau bapak / ibu tirinya. Akan tetapi hak mewaris dari anak tiri lebih banyak pada orang tua kandungnya dari pada salah satu orang tua tirinya. Hal ini karena ahli waris yang sah adalah mereka yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan menyamping.

Terhadap ibu atau bapak kandungnya anak ini adalah sebagai ahli waris, tetapi terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan ahli waris, melainkan hanya warga serumah tangga saja. Kadang-kadang di dalam rumah tangga tercermin hubungan yang sangat akrab sekali antara bapak atau ibu tiri dengan anak tiri, sehingga anak tiri ini mereka anggap sebagai anak kandungnya. Atas dasar inilah sehingga

anak tiri mendapat pemberian dari salah satu orang tua tirinya dalam bentuk hibah atau “pamarek dangan”.

Jadi jelaslah anak tere (anak tiri) berhak juga mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya.

b. Ahli Waris Anak Piaraan (anak angkat)

Dalam bahasa Dayak Kanayatn, anak angkat ini disebut dengan “Anak Piaraan” adalah anak orang lain atau anak keluarga yang diambil dari orang tua kandungnya kemudian dibawa dalam keluarga sendiri.

Ada beberapa sebab atau alasan dilakukannya pengambilan anak angkat pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, yaitu antara lain karena suami-istri tidak dikaruniai anak atau suami-istri tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, maka diangkatlah anak orang lain atau anak keluarganya sendiri ke dalam keluarga yang mengangkat anak tersebut.

Setelah dewasa, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Kewajibannya adalah memelihara orang tua angkatnya sedangkan haknya ia (anak angkat) adalah berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, anak angkat dapat mewaris jika waktu pengangkatannya dilakukan secara adat, dan dilakukan pada waktu anak itu masih bayi.

c. Ahli Waris Anak Kampakng (anak di luar kawin)

Menurut bahasa Dayak Kanayatn anak yang lahir di luar perkawinan yang sah baik menurut hukum adat maupun menurut hukum agamanya disebut “Anak Kampakng”. Anak ini baru mempunyai hak mewaris apabila anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya setelah melangsungkan perkawinan yang sah baik melalui upacara adat maupun melalui hukum agamanya.

d. Ahli Waris Kamudak Dalam Parut (anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya)

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut “Kamudak Dalam Parut”. Anak yang dimaksudkan di sini adalah anak yang masih dalam kandungan ibunya pada waktu orang tuanya cerai.

Anak ini baru dapat menjadi seorang ahli waris apabila adanya “Siam pangakoan anak” dari orang tuanya. Pengertian siam pangakoan anak adalah sebuah tempayan yang digunakan oleh orang tua laki-laki sebagai tanda bahwa anak itu sah menjadi anak kandungnya yang dilakukan melalui upacara adat. Jika orang tuanya tidak memberikan tanda berupa siam pangakoan anak, maka anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris oleh pewaris.

e. Ahli Waris Orang Tua

Ahli waris ini adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dalam hubungan kekeluargaan dengan si pewaris. Ahli waris

ini baru berhak mewaris bila tidak ada ahli waris lain menurut ketentuan adat dan ahli waris ini mempunyai hak penuh atas harta warisan si pewaris.

Demikian yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris (anak dan istri / suami), maka orang tua pewaris berhak untuk mewaris harta warisan anaknya.

f. Ahli Waris Saudara Laki-laki (paman) dan Saudara Perempuan (bibi)

Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, paman atau bibi dapat mewaris harta peninggalan dari pewaris (keponakannya) apabila pewaris itu tidak mempunyai ahli waris yang lainnya, tetapi dengan syarat paman atau bibinya telah merawat pewaris selama sakit sampai meninggal.

Jadi jelaslah bahwa saudara laki-laki (paman) atau saudara perempuan (bibi) dapat mewaris jika orang tua pewaris telah meninggal dunia.

g. Ahli Waris Keponakan

Dalam bahasa Dayak Kanayatn, keponakan ini disebut "kamenakan" yaitu anak dari saudara kandungnya. Keponakan ini pada masyarakat adat Dayak Kanayatn juga mewaris, apabila ahli waris dari pewaris semuanya tidak ada atau telah meninggal dunia



semuanya, tetapi dengan syarat ia telah merawat atau mengurus pamannya dari sakit sampai meninggal dunia.

h. Ahli Waris Nenek atau Kakek

Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, ahli waris ini juga dikenal, ia dapat mewaris apabila saudara-saudara pewaris, ayah atau ibu dan yang lain-lainnya telah meninggal dunia.

### C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERUBAHAN DALAM KETENTUAN HUKUM ADAT WARIS PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAHOKNG

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6  
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan  
Dalam Ketentuan Hukum Adat Waris  
di Desa Pahokng

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
a	Faktor ekonomi	12	38,71
b	Faktor agama	7	22,58
c	Faktor pendidikan	11	35,48
d	Faktor sosial budaya	1	3,23
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa 12 responden (38,71%) menjawab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan

dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng adalah faktor ekonomi, 7 responden (22,58%) menjawab faktor agama yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris, dan 11 responden (35,48%) menjawab faktor pendidikan yang menyebabkan terjadinya perubahan ketentuan hukum adat waris tersebut. Sedangkan 1 responden (3,23%) menjawab bahwa faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum adat waris.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut di atas, antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng pada umumnya petani yang penghasilannya hanya cukup membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan kebutuhan lainnya masih banyak yang perlu dibenahi. Keadaan inilah yang membuat orang Dayak Kanayatn di Desa Pahokng meninggalkan kampung halaman dan keluarganya dengan tujuan mencari pekerjaan agar dapat memperbaiki kehidupannya. Lama kelamaan mereka bekerja hingga akhirnya kawin, kemudian diam dan menetap dimana ia bekerja. Hal inilah yang menyebabkan orang tua (pewaris) beranggapan bahwa anak tersebut sudah mampu sendiri jadi tidak perlu diberi warisan.

Demikian pula halnya dengan anak yang sudah mampu dibidang ekonomi, ia juga tidak mutlak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal ini disebabkan karena anak tersebut sudah mampu

membiayai kehidupannya, sehingga bagiannya diberikan kepada ahli waris yang benar-benar memerlukan harta warisan tersebut untuk membiayai keperluan hidupnya.

Jelaslah bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng dewasa ini.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga membawa dampak terhadap pembagian harta warisan, di mana adanya pendidikan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng yang masih tradisional. Pendidikan yang dianggap sangat penting menjadikan ahli waris yang berhak mewaris, meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka enggan untuk pulang ke kampung halaman dan mereka berusaha mencari pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang ia dapatkan di bangku pendidikan. Dengan demikian ahli waris tersebut tidak mutlak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, kecuali ahli waris itu kembali ke kampung halamannya dan menuntut warisan orang tuanya.

c. Faktor Agama

Di provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya bermacam-macam agama tidak menutup kemungkinan orang yang akan melangsungkan perkawinan pindah kepercayaan (agama).

Dalam kenyataannya, ini terbukti ada anggota masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng telah melakukan perkawinan kemudian ikut agama suami atau istrinya yang beragama Islam dan ada yang diam dan bertempat tinggal di luar harta warisan orang tuanya.

d. Faktor Sosial Budaya

Dewasa ini, kehidupan sosial budaya di daerah yang satu dengan daerah lain tidaklah sama. Hal ini disebabkan karena ada daerah yang kehidupan sosialnya sudah maju karena dipengaruhi adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ada juga yang kehidupan sosialnya masih rendah. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi inilah mempengaruhi gaya kehidupan dan pola pikir mereka, sehingga ada di antara mereka yang ingin merasakan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi, sedangkan untuk merasakan semua itu harus meninggalkan kampung halamannya dan tidak menutup kemungkinan ia kawin dan menetap di luar harta warisan orang tuanya. Faktor sosial budaya ini juga berpengaruh terhadap perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng.

Dari ke 4 (empat) faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris di Desa Pahokng adalah faktor ekonomi, karena orang tua kebanyakan beranggapan bahwa anak yang telah kawin kemudian diam dan menetap di luar harta warisannya tidak perlu diberi harta warisan sebab anak tersebut sudah mampu hidup mandiri.

#### **D. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAHOKNG**

Seaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pewarisan dapat dilakukan dengan cara penunjukan atau dengan cara wasiat (pesan), selain itu pewarisan juga dapat dilaksanakan setelah si pewaris meninggal dunia.

Walaupun dalam pembagian harta warisan telah disetujui oleh masing-masing para ahli waris, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa tentang harta warisan, contohnya masalah batas tanah dan penguasaan tanah oleh seorang ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7  
Sengketa Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat  
Dayak Kanayatn di Desa Pahokng

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
a	Sering terjadi	2	6,45
b	Tidak pernah terjadi	-	-
c	Kadang-kadang	29	93,55
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa 2 responden (6,45%) menjawab sering terjadi sengketa tentang harta warisan, hal ini karena ada ahli waris yang ingin coba-coba untuk mengambil warisan orang tuanya, sehingga ahli waris yang merasa dirugikan menuntut kepada ahli waris yang mengambil bagian yang seharusnya menjadi

miliknya dan ada pula ahli waris yang merasa tidak puas terhadap pembagian yang telah ditentukan oleh pewaris. Sedangkan 29 responden (93,55%) menjawab kadang-kadang terjadi sengketa tentang harta warisan.

Jika terjadi sengketa warisan maka tahap penyelesaiannya sebagai berikut :

#### 1. Melalui Musyawarah Keluarga

Apabila terjadi sengketa warisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, berdasarkan kebiasaannya semua anggota keluarga pewaris (ahli waris) berkumpul atau dikumpulkan oleh salah satu anggota ahli waris yang disebut kepala waris yang bertempat di rumah salah satu ahli waris yang bersengketa. Syarat ahli waris yang ditunjuk sebagai kepala waris haruslah :

- a. Sudah berkeluarga atau sudah dewasa.
- b. Bersikap jujur, arif, dan bijaksana baik terhadap orang tuanya maupun terhadap saudara-saudara kandungnya.
- c. Berdiam dan bertempat tinggal dimana harta warisan itu berada.

Dalam musyawarah keluarga, kepala waris mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului petunjuk atau nasehat bahwa betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan, rasa malu terhadap keluarga atau tetangga, serta beban bagi arwah yang telah kembali ke alam baka. Apabila dalam musyawarah ini para pihak (ahli waris) yang bersengketa menerima hasil keputusan ini maka perselisihan dianggap selesai.

## 2. Melalui Musyawarah Adat

Apabila masalah sengketa harta warisan belum dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga, untuk selanjutnya masalah itu dapat diajukan ke fungsionaris adat tingkat desa yang terdiri dari Kepala Adat atau Temenggung, pasirah dan pangaragah.<sup>52</sup>

Adapun penjelasan tentang wewenang masing-masing fungsionaris adat tersebut adalah sebagai berikut :

### 1). Tumenggung atau Kepala Adat

Sekarang bisa disebut penguasa Adat Binus adalah fungsionaris adat tingkat ketiga dalam urusan penyelesaian perkara adat. Wewenangnya adalah untuk menyelesaikan setiap perkara adat yang merupakan wewenang khusus Temenggung seperti Ngapos Kompokng Buah dan Panyugu (menebang pohon buah-buahan) yang jumlahnya banyak dan tempat yang dianggap keramat).

### 2). Pasirah

Wewenangnya adalah melaksanakan pelimpahana wewenang dari Kepala Adat atau Temenggung Binua yang dibantu oleh pangaragah untuk menyelesaikan setiap jenis perkara ringan yang diajukan oleh warga masyarakatnya. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka perkara tersebut diteruskan kepada Kepala Adat atau Temenggung.

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pahokng

### 3). Pangaragah

Kalau terjadi perselisihan di Desa, maka tugasnya yang paling utama dalam menanganinya. Wewenangnya adalah untuk menerima setiap pengaduan dari warga masyarakat dan menyelesaikan secara adat mengenai perkara ringan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkara adat dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng penyelesaiannya adalah merupakan wewenang fungsionaris adat tingkat Desa, sedangkan Ketua Dewan Adat Kecamatan tidak berwenang menyelesaikan perkara adat yang terjadi di wilayah kerjanya. Tugas Ketua Dewan Adat Kecamatan hanyalah membina fungsionaris adat tingkat Desa dalam bidang adat istiadat dan kesenian daerah. Oleh karena itu kerjasama antara fungsionaris adat untuk menyelesaikan perkara adat sangat diutamakan agar perkara adat tidak sampai ke Pengadilan Negeri dan setiap keputusan yang dihasilkan dalam peradilan adat betul-betul berpihak kepada yang benar.

Untuk menyelesaikan sengketa warisan itu, fungsionaris adat beserta Kepala Desa diundang oleh para ahli waris yang bersengketa untuk mencari penyelesaiannya. Sebelum ketua adat atau Temenggung memutuskan sengketa warisan itu, terlebih dahulu ketua adat atau temenggung harus mengetahui bagaimanakah hingga terjadinya sengketa warisan.



Seandainya sengketa warisan itu tidak didahului dengan perkelahian maka ketua adat langsung mencari jalan penyelesaiannya, sedangkan apabila perselisihan itu didahului dengan perkelahian dan membawa senjata tajam serta langsung digunakan, maka ketua adat atau temenggung berhak menghukum ahli waris itu dengan sebutan "Talanyakng Basi".

Talanyakng Basi artinya membawa senjata yang terbuat dari besi dan diketahui bahwa senjata itu berbahaya serta dapat menghilangkan nyawa seseorang. Untuk itu ahli waris yang membawa senjata itu dihukum 6 (enam) tahl tangngah mati 3 (tiga) tahl tangngah, yang terdiri dari :

1. Tempayan 1 buah dan batutup mangkok / lagor.
2. Ayam 1 ekor.
3. Babi 1 ekor beratnya  $\pm$  15 kg.
4. Beras pulut.
5. Beras biasa.
6. Kunyit.

Semua bahan tersebut dibawa ke tempat harta warisan yang disengketakan, dengan dihadiri oleh fungsionaris adat dan para anggota masyarakat untuk menyaksikan jalannya penyelesaiannya sengketa warisan. Dalam hal ini ketua adat sangat berperan sekali untuk mengambil keputusan agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Berbagai macam pertimbangan fungsionaris adat tingkat adat

tingkat desa, barulah diambil hasil keputusan kepala adat maka sengketa itu dianggap selesai. Para anggota sudah tuntas sehingga jelas hak masing-masing ahli waris yang bersengketa.

Setelah urusannya selesai, bahan-bahan kelengkapan yang telah disiapkan sebelumnya seperti : ayam, babi, dan beras dimasak semuanya, kemudian dimakan oleh semua orang yang hadir dalam acara tersebut.

### 3. Melalui Pengadilan Negeri

Apabila sengketa warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah adat, para pihak yang berselisih dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Negeri. Karena besarnya rasa malu dan atas nasehat serta petuah para tetua adat dan pemuka masyarakat, masalah sengketa warisan dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng tidak ada yang sampai ke Pengadilan Negeri.

Hal tersebut berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak yang hasilnya menyatakan bahwa sengketa harta warisan yang pernah terjadi belum ada yang sampai diajukan ke Pengadilan Negeri. Sengketa warisan yang pernah terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan melalui peradilan adat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8  
 Cara Penyelesaian Yang Ditempuh Oleh Ahli Waris Jika  
 Terjadi Sengketa Warisan

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentase
a	Melalui musyawarah keluarga	17	54,84
b	Melalui musyawarah adat	14	45,16
n = 31		31	100

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa 17 responden (54,84%) menjawab apabila terjadi sengketa warisan, cara penyelesaian yang ditempuh oleh ahli waris yang merasa dirugikan adalah diselesaikan secara musyawarah keluarga, sedangkan 14 responden (45,16%) menjawab penyelesaian sengketa warisan diselesaikan melalui musyawarah adat.

Sepanjang penelitian yang penulis lakukan, belum pernah sengketa warisan diajukan sampai ke Pengadilan Negeri. Walaupun pernah terjadi sengketa warisan di Desa Pahokng akan tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui musyawarah adat. Jika penyelesaiannya secara kekeluargaan dan melalui musyawarah adat tidak tercapai, maka upaya yang terakhir adalah melalui Pengadilan Negeri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum waris adat dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng telah mengalami perubahan, dimana ketentuan yang mengatur ahli waris yang telah kawin kemudian tidak tinggal dan menetap di lingkungan harta warisan orang tuanya tidak mutlak lagi mendapatkan harta warisan orang tuanya.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Pahokng, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, agama dan sosial budaya.
3. Jika terjadi sengketa warisan, penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut, sedangkan cara penyelesaiannya melalui tahap-tahap sebagai berikut :
  - a. Pertama diselesaikan melalui musyawarah keluarga.
  - b. Kedua diselesaikan melalui musyawarah adat.
  - c. Ketiga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi penyelesaian ini pada umumnya tidak berlaku karena setiap kali terjadinya sengketa warisan, dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan melalui musyawarah adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zuhrah Muhammad, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta, 2001.
- Anyang Thambun. Y. C., Kebudayaan Dan Perubahan Daya Taman Kalimantan Dalam Arus Modernisasi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Bekerja sama dengan Perwakilan Koninklijk Institut voor Taal-, Land-end Volkenkunde, Jakarta, 1998.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Azhar Ahmad, Hukum Kewarisan, Bagian Penerbitan FH-UII, Yogyakarta, 1990.
- Faisal Sanafiah, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi, IKIP Malang, 1990.
- Hasan A, Al Faraid – Ilmu Pembagian Waris, Pustaka Progresif, Surabaya, 1986.
- Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1970.
- ....., Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an, Tinta Mas, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
- ....., Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1985.
- ....., Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- ....., Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- ....., Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- ....., Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, 1989.
- Moleong. J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Muhammad Bushar, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- ....., Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995.

- Muslim. A Irene, Peradilan Adat Pada Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 1991.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1996.
- Mustafa Bachsan, Sistem Hukum Indonesia, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Nasution S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
- Perangin Effendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1991.
- Soemitro Irma Setyowati, Beberapa Aspek Kewarisan Pada Kekerabatan Matrilineal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Soemitro Hanitijo Ronny, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soepomo R, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soekanto Soerjono dan Taneko, Soleman B, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono dan Usman Yusuf, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Subekti R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1961.
- Sudiyat Imam, Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991.
- ....., Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Suparman Eman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Syarif Surini Ahlan, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUHP), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soekito Sri Widayati Wiratmi, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983.

Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 1992.

Taneko Soleman B, Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987.

Ter Haar Bzn, Terjemahan Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Wignjodipoero Soerojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Undang-undang Dasar 1945, BP-7 Pusat, 1996.

Musyawarah Adat (Musdat), 1985.